



**RENCANA STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANTUL**

2021-2026

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	LATAR BELAKANG	
1.2	LANDASAN HUKUM	
1.3	MAKSUD DAN TUJUAN	
1.4	SISTEMATIKA PENULISAN	
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN	
2.1	TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI	
2.2	SUMBER DAYA	
2.3	KINERJA	
2.4	TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN	
3.2	TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	
3.3	TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI	
3.3.1	TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PERDAGANGAN	
3.3.2	TELAAH RENSTRA DINAS PERDAGANGAN DIY	
3.4	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	
3.4.1	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH	
3.4.2	TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	
3.5	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII	PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, dokumen ini juga menunjukkan peran Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Bupati Bantul pada periode pemerintahan tahun 2021-2026.

Secara umum, Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bantul **Nomor ...Tahun 2021**. Selain itu, penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi perekonomian Kabupaten Bantul, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya urusan perdagangan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 juga telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana tahapan proses penyusunan Renstra dimulai dengan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam rangka penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada awal tahun 2020

yang berimbas pada aktivitas ekonomi dan pendapatan para pelaku usaha termasuk pedagang pasar rakyat yang ada di Kabupaten Bantul.

Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sebagai dokumen perencanaan jangka menengah telah mencantumkan berbagai strategi yang dirumuskan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 pada urusan perdagangan serta langkah-langkah yang mengarah pada upaya recovery pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Keseluruhan strategi tersebut akan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Selain dari sisi kebijakan dan strategi untuk merespons dan mendukung penanganan Covid-19, target pada indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra juga disesuaikan dengan kondisi yang ingin dicapai 4 tahun mendatang.

Pada awal terbentuknya, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan gabungan antara salah satu bidang di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (bidang Perdagangan) dengan Kantor Pengelolaan Pasar. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul berdiri mulai 1 Januari 2017 yang merupakan amanat dari Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, dengan rincian tugas yang tertuang pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan. Pembentukan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, salah satunya adalah urusan pemerintahan pilihan antara lain mencakup urusan perdagangan.

Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul selama ini telah membantu Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengendalikan atau stabilitas harga bahan pokok dan bahan penting lainnya, memfasilitasi hampir 12.000 orang pedagang pasar dan PKL di 32 pasar rakyat dan 4 wilayah pusat PKL, fasilitas perizinan untuk lebih kurang 200 toko swalayan dan gudang, fasilitas bagi eksportir dan calon eksportir, serta pelaksanaan tera/tera ulang untuk 23.000 alat UTTP yang ada di Kabupaten Bantul.

Dengan adanya Permendagri 90 Tahun 2019, maka dibutuhkan transformasi atau penataan kelembagaan baru bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul untuk memperkuat pelaksanaan program-program urusan perdagangan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2024. *(menunggu RPJMD ditetapkan)*
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dibuatnya Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah untuk:

1. menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya;
3. bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan tahun 2021-2026 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di bidang Perdagangan selama 4 (tahun) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di bidang perdagangan serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 4 (empat) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada dapat dikelola secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

DRAFT

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam melakukan transformasi kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dapat berpedoman kepada Permendagri 90 Tahun 2019 untuk memperkuat program-program yang ditetapkan dalam Permendagri tersebut. Penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia seharusnya dapat tercermin melalui perwujudan:

- a. Organisasi yang ramping dan tanpa sekat-sekat;
- b. Organisasi yang lean, clean, and green;
- c. SDM yang adaptif and melek tekonologi; dan
- d. Teknologi Informasi sebagai enabler.

Kondisi eksisting saat ini, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang perdagangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang perdagangan.

Adapun susunan organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul



Sumber: Subbag UK Dinas Perdagangan, 2021

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- d. pengelolaan barang milik daerah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan perdagangan. Bidang Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. perumusan kebijakan bidang pengembangan ekspor serta kelembagaan dan pendaftaran perusahaan;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan ekspor serta kelembagaan dan pendaftaran perusahaan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan ekspor serta kelembagaan dan pendaftaran perusahaan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan ekspor serta kelembagaan dan pendaftaran perusahaan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG SARANA PRASARANA DAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang sarana prasarana dan distribusi perdagangan. Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. perumusan kebijakan bidang sarana dan prasarana perdagangan serta distribusi dan harga barang kebutuhan pokok;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang sarana dan prasarana perdagangan serta distribusi dan harga barang kebutuhan pokok;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sarana dan prasarana perdagangan serta distribusi dan harga barang kebutuhan pokok;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang sarana dan prasarana perdagangan serta distribusi dan harga barang kebutuhan pokok;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PENGEMBANGAN PASAR

Bidang Pengembangan Pasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan pasar. Bidang Pengembangan Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. perumusan kebijakan bidang promosi dan kemitraan, pendapatan serta sarana dan prasarana;

- c. pelaksanaan kebijakan bidang promosi dan kemitraan, pendapatan serta sarana dan prasarana;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang promosi dan kemitraan, pendapatan serta sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang promosi dan kemitraan, pendapatan serta sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. UPT

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan UPT serta pelayanan kemetrolagian legal lainnya

2.2. Sumber Daya

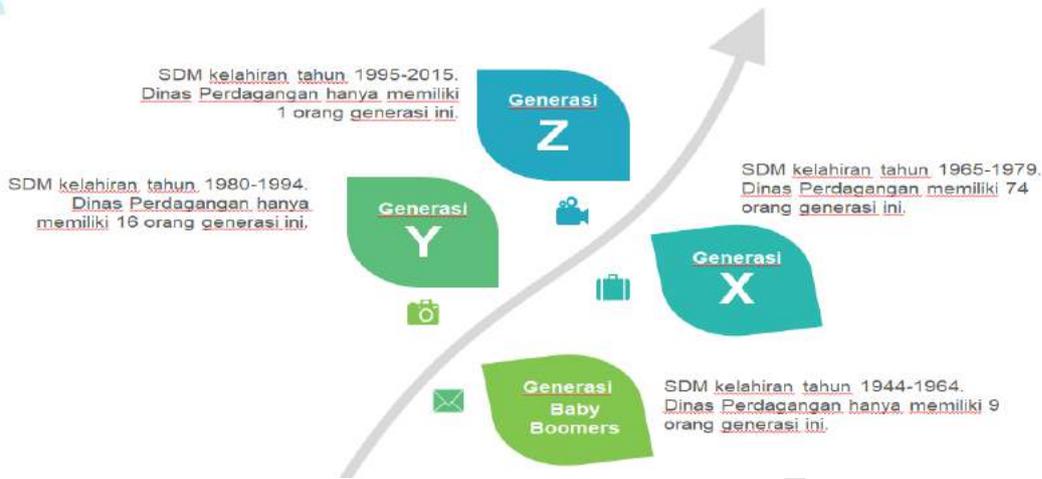
Dalam rangka menjaga organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul juga perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Untuk itu Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul memerlukan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu selalu dilakukan monitoring, evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan.

2.2.1 SDM Aparatur

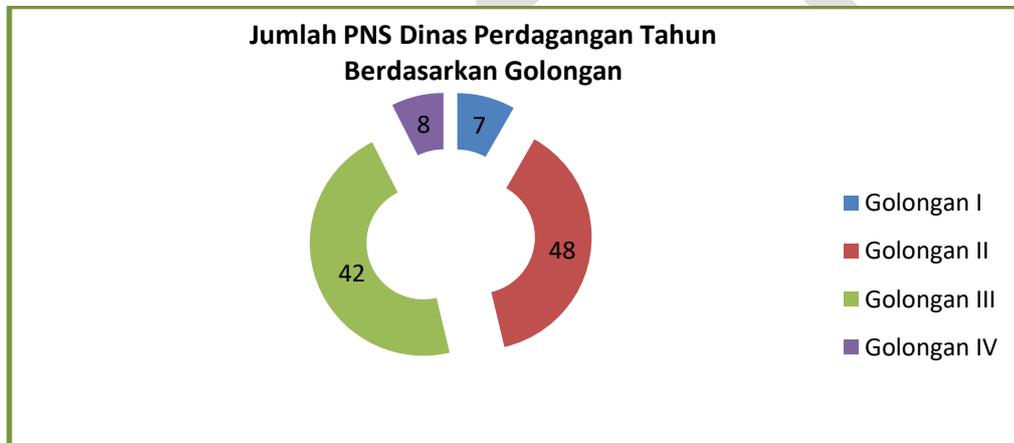
Data kondisi SDM Dinas Perdagangan per tanggal 1 Januari 2021 berdasarkan basis data aplikasi SAPA ASN adalah sebagai berikut:

- a. Total pegawai per 1 Januari 2021 adalah sejumlah 105 orang. Proporsi berdasarkan generasi terdata 1% generasi Z, 16% generasi Y, 74% generasi X dan 9 % generasi Baby Boomers. Diproyeksikan pada tahun 2024 mendatang dengan mempertimbangkan proyeksi pegawai pensiun dan penambahan ASN baru, jumlah generasi millennial (generasi Y dan Z) Dinas Perdagangan hanya mencapai 35% dan masih didominasi oleh generasi X sebesar 65%.

SDM berdasarkan Generasi



- b. Berdasarkan golongan, pegawai terbanyak adalah golongan II yaitu sejumlah 48 orang (43,8%) dan terbanyak kedua adalah pegawai golongan III sejumlah 42 orang, diikuti dengan golongan IV sejumlah 8 orang dan golongan I sejumlah 7 orang.



Gambar 2.2 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Golongan
 Sumber: Aplikasi SAPA ASN, diolah, 2021

- c. Saat ini komposisi pegawai laki-laki dibandingkan dengan pegawai perempuan adalah 5:1 atau sejumlah 86 orang pegawai laki-laki dan 19 pegawai perempuan.



Gambar 2.3 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Jenis Kelamin
 Sumber: Aplikasi SAPA ASN, diolah, 2021

- d. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, proporsi terbesar adalah pegawai dengan pendidikan S1/DIV sebesar 33% atau 27.076 orang dan diikuti tingkat pendidikan DIII atau lebih rendah sebesar 32% atau 26.611 orang.

Tabel 2.1 SDM Penyelenggara Urusan Perdagangan

JENIS PENDIDIKAN							JML	GOLONGAN				JML
SD	SMP	SMA	D1/D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV	
4	7	66	1	17	10	0	121	10	40	46	9	105

Sumber: Aplikasi SAPA ASN, diolah, 2021

Proyeksi kebutuhan sumberdata aparatur Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 untuk jangka waktu 5 tahun disusun berdasarkan analisis beban kerja, kondisi existing SDM, dan dengan berbagai asumsi. Berdasarkan data proyeksi kebutuhan SDM per 31 Desember 2024 sejumlah 174 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Proyeksi Kebutuhan SDM Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Kebutuhan berdasarkan ABK	154	154	154	154
2	Prediksi Pensiun	5	5	5	5
3	Rekrutmen CPNS	5	5	10	10
4	Jumlah ASN per 31 Desember*	169	169	174	174

*) Jumlah ASN tahun *n* ditambah dengan rekrutmen CPNS dikurangi dengan prediksi pensiun

Sumber: Bagian Organisasi Setda Bantul, diolah, 2021

Kebutuhan SDM di sepanjang periode 5 tahun ke depan, seharusnya dioptimalisasi pemenuhannya melalui redistribusi pegawai secara bertahap antar Perangkat Daerah, pengembangan kompetensi pegawai, dan dalam hal dibutuhkan SDM dengan kompetensi tertentu yang tidak dapat dipenuhi dari internal, dapat dipenuhi melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara selektif dan terbatas.

Selain itu, berdasarkan hasil pemetaan pegawai, terdapat ketidaksesuaian kompetensi pegawai yang menyebabkan teridentifikasinya pegawai *idle*. Terkait hal tersebut dibutuhkan kebijakan untuk mewujudkan kesesuaian antara komposisi dan kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi dan optimalisasi kinerja organisasi.

2.2.2 Aset/Modal

Aset Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset lainnya. Nilai aset Dinas Perdagangan berdasarkan data aplikasi SIMAS (SIM Aset) bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Aset Dinas Perdagangan

NO.	ASET	NILAI ASET (RP)
1	Tanah	32.870.851.583
2	Peralatan dan Mesin	5.614.747.180
3	Gedung dan Bangunan	131.511.152.437
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	124.274.909
5	Aset tetap lainnya	9.284.833

6	Aset lainnya	135.580.750
Jumlah		170.265.891.679

Sumber: aplikasi SIMAS, diolah, 2021

Dalam rangka optimalisasi aset, Dinas Perdagangan juga telah melakukan kegiatan penilaian kembali BMD (sensus aset) pada tahun 2020. Tujuan dari sensus aset adalah untuk meningkatkan kualitas penyajian data nilai aset pada Laporan Keuangan, membangun database BMD yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMD, serta untuk mengidentifikasi BMD berupa tanah dan/atau bangunan serta sarpras lainnya yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dengan basis data yang akurat dan aktual.

Untuk menjaga validitas atas nilai aset, diperlukan pengamanan terhadap aset melalui tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Dinas Perdagangan dengan difasilitasi oleh BKAD Kabupaten Bantul, DPTR Kabupaten Bantul juga bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka Program Percepatan Sertifikasi BMD sebagai upaya pengamanan BMD aset berupa tanah dan bangunan strategis baik dari segi fisik maupun dari aspek keabsahan kepemilikan aset. Sampai saat ini, progres sertifikasi BMD tanah ialah sebanyak 5 bidang atau 30% dari 16 bidang yang diusulkan untuk disertifikatkan. Kendala terkait pengamanan aset strategis adalah hilangnya bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul pernah membeli aset tersebut serta keterbatasan sumber daya.

Selain tanah, Dinas Perdagangan juga mengalami keterbatasan jumlah kendaraan bermotor. Dengan jangkauan lokasi binaan di 32 pasar rakyat, toko swalayan, toko kelontong, dan pedagang kaki lima yang tersebar di 17 kecamatan, seharusnya Dinas Perdagangan ditunjang dengan sarana kendaraan yang cukup. Kondisi saat ini, kendaraan roda 4 sejumlah 8 unit dimana hanya 3 unit yang kondisinya baik, dan untuk kendaraan roda 2, hanya 10 unit yang kondisi baik dari total 21 unit.

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian dari Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul periode 2016-2021 menjadi pijakan untuk melakukan *self-evaluation* atas langkah-langkah yang telah diambil dan menjadi titik tolak untuk merumuskan kebijakan untuk periode 4 tahun mendatang. Selain capaian-capaian yang diraih Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Bantul terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan *stakeholders* kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul akan dijabarkan sebagai masukan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul tahun 2021-2026.. Selanjutnya, dalam rangka melayani *stakeholders* serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator di bidang perdagangan, akan dipaparkan pula potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul pada periode 4 tahun mendatang dan dirumuskan selanjutnya menjadi lebih responsif, efektif dan efisien.

Terkait dengan misi Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, Dinas Perdagangan berkontribusi pada misi 3 “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan” dengan beberapa kebijakan yang diambil seperti meningkatkan ketersediaan bahan pokok secara berkelanjutan dengan harga yang stabil, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk eksporn serta meningkatkan aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana pasar rakyat.

Tabel
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

No	IKU	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7	7,05	7.10	7.15	7.20	7.25	7,04	7.09	13.96	32,18	-1,3	7,25	100,57	101,28	196,62	450,07	-13,89	100
2	Jumlah pasar tipe A	Unit	1	1	1	2	3	4	1	1	1	4	4	4	100	100	100	300	133	100
3	Pertumbuhan PRDB sektor perdagangan	%	4,61	4,76	5.33	6,33	6.62	6.95	6,64	5,69	5,64	5.69	-0,08	6,95	144,02	119,54	105,82	89,89	-13,29	100

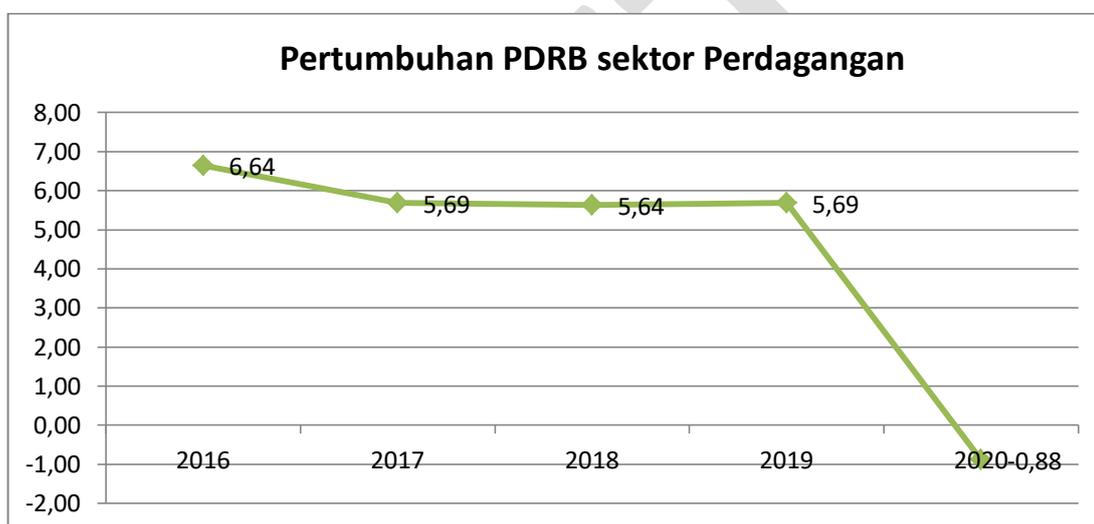
Sumber: esakip, diolah, 2021

IKU: Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan



PDRB Bantul menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub kategori. Pemecahan menjadi sub kategori ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan adalah data output barang dari industri domestik (dari Seksi Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh BPS.

Capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan yang sudah dicapai menunjukkan pertumbuhan yang positif kecuali pada tahun 2020. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 5,69% maka capaian tahun 2020 turun sebesar 6,57%.



Gambar 3.4 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan

Sumber: Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2014-2020, diolah

Untuk mendukung sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan ini program yang dilaksanakan selama tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
3. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

a. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Tabel 3.8

Pengukuran Kinerja Indikator Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Indikator	Target						Realisasi					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang ditera/tera ulang 9%)	n/a	6.5	7	7.5	8	8.5	n/a	10.56	44.14	9.8	10.11	8.5

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Masih ada permasalahan yang ditemui, yakni terkait regulasi pelaksana verifikasi alat standar kemetrologian kelas M2 (Bidur 20kg) yang sudah bisa dilimpahkan ke UML Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya masih simpang siur. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun berikutnya adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait kepastian regulasi
2. Melakukan verifikasi mandiri untuk alat standar kemetrologian kelas M2
3. Untuk meningkatkan pelayanan tera/tera ulang, pembangunan gedung metrologi tahap II dilanjutkan dengan dana bersumber APBD/APBN
4. Dengan semakin terbatasnya jumlah SDM penera, maka pengiriman ASN untuk mengikuti diklat calon penera dioptimalkan
5. Dengan berlakunya Permendagri 90/2019 dan Kependagri 50/2020, maka untuk tahun selanjutnya kegiatan kemetrologian ini juga menyentuh pada pengawasan terhadap BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) yang merupakan amanat dari UU 23/2014.

b. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Indikator Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Indikator	Target						Realisasi					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
persentase deviasi harga komoditas strategis	n/a	5	5	5	5	5	n/a	3.96	3.5	2.71	1.35	0.77

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Capaian indikator program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri adalah persentase deviasi harga komoditas strategis (deviasi harga yang ditargetkan adalah dibawah 5 persen). Pada tahun 2016-2021 angka deviasi harga komoditas strategis adalah selalu dibawah 10 persen, dimana deviasi harga ini dibawah 10 persen masih masuk dalam kategori inflasi ringan (normal). Meskipun di masa pandemi, pemerintah berusaha untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pemantauan harga barang kebutuhan pokok dilaksanakan secara rutin setiap hari di 5 pasar rakyat di Kabupaten Bantul yaitu Pasar Niten, Pasar Bantul, Pasar Imogiri, Pasar Piyungan dan Pasar Pijenan. Jenis barang kebutuhan pokok yang dipantau seperti Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Telur Ayam, Daging sapi, Daging ayam, Bawang Merah, Bawang Putih dan Cabe.

Pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok juga dilakukan pada saat tertentu menjelang hari besar keagamaan nasional seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru yang secara rutin dilaksanakan bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bantul maupun Provinsi DIY ke pasar rakyat maupun distributor/ pelaku usaha.

Selain itu juga dilaksanakan Operasi Pasar Murni (OPM) maupun Pasar Murah yang dilaksanakan bekerjasama dengan Disperindag DIY, Bulog Divre DIY, Distributor barang kebutuhan pokok lainnya untuk menjaga kestabilan harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau, terutama dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN). Adapun hasil pelaksanaannya sebagai berikut :



Pemantauan ketersediaan dan harga bapak di pasar piyungan dan pasar niten



Pemantauan di Pasar Imogiri bersama TPID Kab. Bantul menjelang Hari Raya Idul Fitri

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Peningkatan Efisiensi Dalam Negeri ini antara lain:

- Adanya pandemi Covid 19
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mentaati peraturan yang ada.
- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran konsumen/ masyarakat untuk membeli barang yang aman baik dari segi kesehatan maupun aturan.
- Masih ditemukan penyalahgunaan bahan berbahaya di pasar rakyat

Upaya yang akan dilakukan pada tahun berikutnya antara lain:

- Menjaga stabilitas harga dengan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap HET beberapa jenis barang kebutuhan pokok yang telah ditentukan harganya oleh Pemerintah;
- Menjaga ketersediaan stok dengan mengoptimalkan penyampaian laporan dari pelaku usaha/distributor barang kebutuhan pokok;
- Memantau stok yang ada di gudang untuk menghindari penimbunan barang kebutuhan pokok;

- Mengajak masyarakat agar berbelanja sesuai kebutuhan dan penggunaan produk dalam negeri;

c. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Indikator Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Indikator	Target						Realisasi					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kawasan Pedagang Kaki lima	n/a	1	2	3	4	5	n/a	1	3	3	4	4

Menghadapi pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) saat ini, menjadikan beberapa permasalahan yang cukup signifikan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) disatu sisi merupakan pemenuhan lapangan kerja dan menjadi kekuatan perekonomian rakyat, sedangkan disisi lain kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan dengan munculnya kesan buruk, dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Untuk mengatasi hal tersebut, tentunya perlu dilakukan penataan pada suatu kawasan tertentu, sehingga PKL bisa tertata rapi dan aktifitas masyarakat di jalan raya tidak terganggu. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bantul juga harus terus melakukan pemberdayaan PKL baik melalui roadshow, pelatihan maupun pengadaan sarana penunjang bagi PKL tersebut.

IKU: Jumlah Pasar Tipe A



Sebagai bagian dalam urat nadi perekonomian nasional, peran pasar rakyat/tradisional sangatlah signifikan untuk menjalankan berbagai fungsinya, antara lain memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; meningkatkan kesempatan kerja; menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha UMKM; menjadi referensi harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; meningkatkan PAD; dan sebagai salah satu sarana pelestarian budaya setempat.

Sasaran meningkatnya kualitas pasar rakyat diukur melalui indikator jumlah pasar rakyat tipe A. Berdasarkan Permendag 77/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, pasar rakyat tipe A merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi). Dengan tipe seperti itu, maka

di Kabupaten memiliki 4 pasar dengan tipe A yakni Pasar Imogiri, Pasar Bantul, Pasar Piyungan, dan Pasar Niten.

Untuk meningkatnya kualitas pasar rakyat ini berbagai upaya telah dilakukan antara lain:

a. Program Penataan Pasar Rakyat

Upaya yang telah dilakukan adalah melengkapi fasilitas – fasilitas yang ada di Pasar Rakyat, Melakukan pemeliharaan/rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana pasar yang mengalami kerusakan, melakukan revitalisasi guna menghidupkan kembali pasar rakyat di jaman yang modern ini, serta memberikan suasana nyaman dan aman pada kegiatan perdagangan yang ada di Pasar Rakyat Kabupaten Bantul.

Tabel 3.16 Pengukuran Kinerja Program Penataan Pasar Rakyat

Indikator	Target						Realisasi					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
cakupan jumlah kondisi pasar baik (%)	20	66.67	69.7	72.73	75.76	78.79	20	75.76	78.12	62.5	75	78.79

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Indikator program penataan pasar rakyat ini adalah cakupan jumlah kondisi pasar baik. Persentase pasar baik sampai tahun 2020 sebesar 75 persen.

b. Program Pemberdayaan Pedagang

Tabel 3.15 Pengukuran Kinerja Program Pemberdayaan Pedagang

Indikator	Target						Realisasi					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	5.6	4.2	4.4	4.6	4.8	5	5.6	3.5	3.5	0.47	2.5	5

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Indikator program pemberdayaan pedagang ini adalah pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat. Pengambilan data diperoleh dari hasil survey omzet pedagang pasar rakyat dengan sasaran pedagang pasar dengan komoditas bahan makanan, bahan makanan segar, toiletries, sandang, peralatan dapur, dan lainnya.

Dilihat dari hasil omzet pedagang, terdapat penurunan omzet pedagang dari tahun ke tahun. Penyebab penurunan omzet yang sangat signifikan tersebut karena makin berkurangnya konsumen yang belanja di pasar, semakin sedikitnya pedagang, serta munculnya pandemi Covid-19.

Rencana yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya adalah:

1. Peningkatan SDM para pedagang Pasar

2. Keberadaan pasar rakyat masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat luas melalui promosi pasar
3. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat oleh pedagang pasar rakyat
4. Beberapa pedagang mulai dengan memasarkan produk dagangannya melalui media online
5. Meningkatnya kesadaran pedagang tentang pentingnya memperbaiki organisasi kepengurusan APPSI

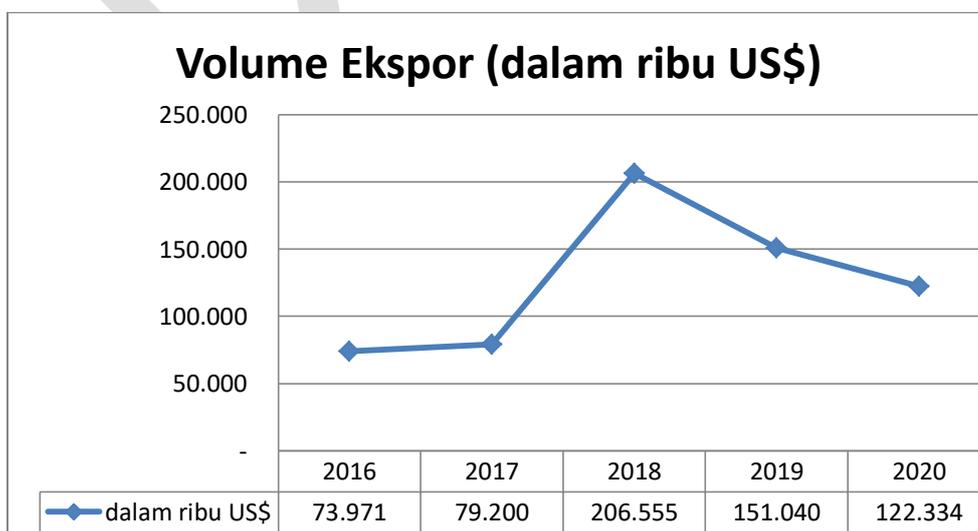
Permodalan yang terbatas merupakan salah satu permasalahan dalam pengelolaan pasar rakyat/tradisional khususnya pedagang. Hal ini memberikan dampak terhadap munculnya rentenir yang menjanjikan pinjaman uang dengan banyak kemudahan, namun dengan tingkat suku bunga yang tinggi.

Pemerintah Kabupaten Bantul secara berkelanjutan telah mengantisipasi melalui pelaksanaan pinjaman dana bergulir dengan bunga lunak tanpa agunan bagi para pedagang pasar dalam rangka penguatan modal usaha. Dana bergulir ini sudah menjangkau di 23 pasar rakyat dengan akumulasi modal sebesar Rp7.000.000.000,00 Namun demikian, pinjaman ini baru menjangkau sebanyak 3.354 pedagang (28,44%) dari seluruh pedagang pasar se-Kabupaten Bantul, sehingga ke depan program tersebut dapat ditingkatkan agar akses pedagang untuk mendapatkan penguatan modal lebih terbuka dan banyak untuk meningkatkan kemandirian usaha.

IKU: Pertumbuhan Ekspor



Gambar 3.9. Perkembangan Ekspor 2012-2020 (dalam ribu uS\$)

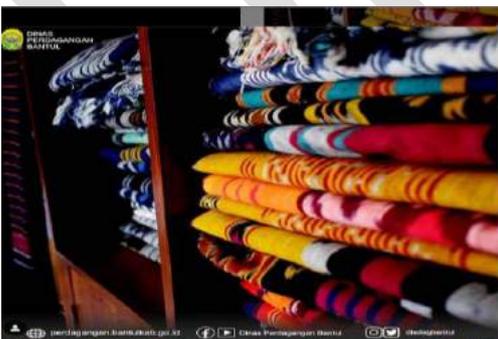


Tabel 3.18 Capaian Kinerja Ekspor Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
----	--------	------	------	------	------	------

1	Volume ekspor	9.642.793,22	10.168.084,06	15.828.755,06	16.645.724,59	15.841.100
2	Nilai ekspor (US\$)	73.971.386,12	79.200.365,60	206.555.454	151.040.882,38	122.334.077,34
3	Jumlah Negara	42	77	83	79	77
4	Macam komoditi	36	34	43	39	49

Pameran dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk ajang pengenalan produk ke masyarakat, pengenalan inovasi baru pada produk yang sudah lama dikenal, pengenalan produk atau jasa kepada pengunjung yang tertarget. Pameran produk memang tidak langsung dapat meningkatkan ekspor Kabupaten Bantul, namun mampu mendongkrak nilai penjualan produk pada saat pameran berlangsung. Analisa pasar saat pameran berlangsung, komoditi dari Kabupaten Bantul sangat diminati karena mempunyai ciri khas dan model yang unik dari kreatifitas para pengrajin asli Kabupaten Bantul.



Kain Lurik menjadi salah satu pakaian tradisional kebanggaan dari masyarakat Kabupaten Bantul setelah batik. Lurik berasal dari kata lorek yang dalam bahasa jawa kuno berarti lajur, garis, atau belang.

Lurik merupakan pakaian tradisional yang unik, dengan perpaduan warna-warni cerah memberi kesan ceria sehingga tidak hanya identik dengan pakaian orang tua. Sentra pembuatan lurik ada di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi dan realisasi anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel Target dan Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	1.628.020.760	1.574.654.223	98.4
2	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	12.375.190.260	11.172.727.646	90.28
3	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	5.119.892.900	5.006.828.600	97.79
Jumlah		58.725.078.800	56.188.694.974	95.68

Sumber: esakip.bantulkab.go.id

Total anggaran untuk program/kegiatan utama selama tahun 2016-2020 adalah sebesar Rp58.725.078.800,-terrealisasi sebesar 95.68%. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja berada pada kategori efektif.

DRAFT

Tabel 2.3.2
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan
 Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Target (juta rupiah)						Realisasi (juta rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	APBD	0	24.814	24.684	23.082	7.457	19.259	0	19.625	23.534	22.347	7.368	19.259	0 %	79.1 %	95.3%	96.8 %	98.8 %	100 %

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, berikut ini tantangan dan peluang yang dihadapi dalam rangka pengembangan sektor perdagangan.

Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul periode 2021-2026 dapat dikelompokkan dalam 3 tema, yakni :

A. Pembinaan Usaha dan Promosi Perdagangan

Tantangan:

1. Database Toko Swalayan, Toko Kelontong, Angkringan, PKL, dan Gudang yang belum update
2. Tatakelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum efektif
3. Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk
4. Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding
5. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri
6. Identifikasi potensi produk ekspor dan pelaku usaha daerah sebagai partner dagang ekspor untuk menemukan peluang pasar ekspor serta menemukan pelaku usaha daerah yang dapat dijadikan sebagai mitra dagang ekspor
7. Perdagangan Bebas
8. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pandemic covid-19

Peluang:

1. Perdagangan Bebas
2. Perkembangan pariwisata
3. Banyaknya jumlah pelaku usaha, toko swalayan, dan toko kelontong
4. Dukungan IT

B. Pasar Rakyat

Tantangan:

1. Turunnya jumlah pengunjung pasar sehingga pendapatan pedagang menurun
2. Revitalisasi fisik dan non fisik (revitalisasi manajemen, ekonomi, dan sosial) Pasar Rakyat
3. Penjaminan mutu Pasar Rakyat melalui penerapan SNI.
4. Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal
5. Masih banyaknya rentenir
6. Penyiapan infrastruktur online untuk platform e-commerce bagi para pedagang di pasar rakyat;

Peluang:

1. Program implementasi e-retribusi
2. Jumlah pedagang pasar yang besar
3. Terdapat pasar ber-SNI
4. Revitalisasi Pasar yang dilaksanakan oleh Kemendag

C. Ketersediaan Bahan Pokok/Strategis dan Pengawasan serta pengendalian Perdagangan

Tantangan:

1. Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal
2. Belum ada SDM khusus untuk tenaga PPNS atau PPTN
3. Database UTTP belum update
4. Perlunya penyesuaian regulasi dengan peraturan perundangan yang baru
5. Terjaganya stabilisasi harga bahan pokok dan penting lainnya
6. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal tertib ukur

Peluang:

1. Banyaknya lembaga mitra kerja dan Perguruan Tinggi
2. Tersedianya TPID tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Pusat

D. Birokrasi dan Pelayanan Publik

Tantangan:

1. Komitmen Pimpinan untuk melakukan Reformasi Birokasi
2. Kebutuhan dan pengembangan SDM
3. Sistem pengelolaan data dan informasi serta Penerapan IT belum berjalan dengan optimal
4. Sistem manajemen kinerja perlu diperkuat
5. Kualitas dialog kinerja, sinergi, dan koordinasi antar unit kerja perlu untuk ditingkatkan untuk menghindari terjadinya duplikasi pekerjaan dan *miscommunication*
6. Perlunya penyelarasan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan ketugasan
7. harmonisasi perencanaan, penganggaran serta evaluasi dapat lebih terintegrasi sehingga penyelenggaraan kinerja dapat lebih efisien dan efektif
8. meningkatkan disiplin dan manajemen SDM

Peluang:

1. Tersedianya pengembangan IT
2. Budaya Kerja
3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

DRAFT

BAB III

GAMBARAN PELAYANAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Dinas Perdagangan kabupaten bantul mengalami beberapa permasalahan bagi terwujudnya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, adapun permasalahan tersebut adalah:

Tabel 3.1
Pemetaan Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Tatakelola Kinerja Sektor Perdagangan yang belum optimal	Belum efektifnya pembinaan usaha dan promosi perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Database Toko Swalayan, Toko Kelontong, Angkringan, PKL, dan Gudang yang belum update 2. Tatakelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum efektif 3. Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk 4. Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding 5. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri 6. Identifikasi potensi produk ekspor dan pelaku usaha daerah sebagai partner dagang ekspor untuk menemukan peluang pasar ekspor serta menemukan pelaku usaha daerah yang dapat dijadikan sebagai mitra dagang ekspor
		Belum optimalnya pengelolaan Pasar Rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turunnya jumlah pengunjung pasar 2. Revitalisasi fisik, ekonomi, dan sosial pasar rakyat belum optimal 3. Penjaminan mutu Pasar Rakyat melalui penerapan SNI belum menyentuh banyak pasar 4. Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal 5. Aksesibilitas modal pedagang pasar rendah 6. Belum tersedia infrastruktur online untuk platform e-co 7. Peraturan Perundangan tentang Pengelolaan Pasar yang kurang

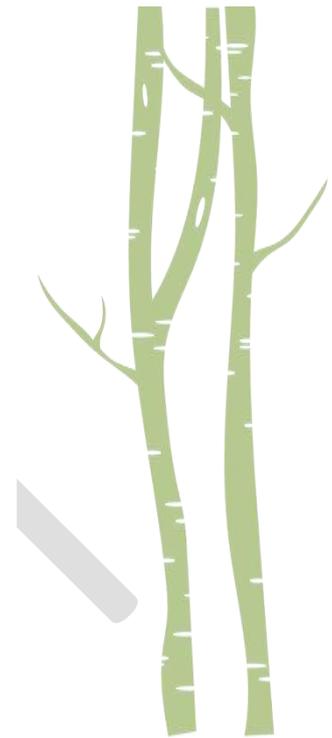
No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			komprehensif
		Belum efektifnya pengelolaan distribusi dan harga bahan pokok/strategis serta pengawasan dan pengendalian perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal 2. Belum ada SDM khusus untuk tenaga PPNS atau PPTN 3. Database UTTP belum update 4. Perlunya penyesuaian regulasi dengan peraturan perundangan yang baru 5. Fluktuasi harga bahan pokok dan penting lainnya 6. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal tertib ukur
		Birokrasi dan Pelayanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pimpinan untuk melakukan Reformasi Birokrasi 2. Kebutuhan dan pengembangan SDM 3. Sistem pengelolaan data dan informasi serta Penerapan IT belum berjalan dengan optimal 4. Sistem manajemen kinerja 5. Kualitas dialog kinerja, sinergi, dan koordinasi antar unit kerja perlu untuk menghindari terjadinya duplikasi pekerjaan dan <i>miscommunication</i> 6. Belum adanya penyesuaian peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan ketugasan 7. harmonisasi perencanaan, penganggaran serta evaluasi belum optimal

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menggambarkan bagaimana tujuan akhir yang diinginkan oleh Bupati terpilih lima tahun mendatang, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan budaya hidup yang ada di Kabupaten Bantul, yaitu:



Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika



Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang.
4. **Bhinneka Tunggal Ika** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia unggul, berkeadilan, dan berbudaya istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, visi dan misi yang merupakan kewenangan Dinas Perdagangan adalah misi 3. Adapun detail penjelasan dapat dilihat dalam tabel .

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika"			
No	Misi dan Program KDH dan KDH Terpilih	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
1	Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan pariwisata 2. Banyaknya jumlah pelaku usaha, toko swalayan, dan toko kelontong yang berdampak pada perputaran uang 3. Dukungan IT 4. implementasi e-retribusi 5. Jumlah pedagang pasar yang besar 6. Terdapat pasar ber-SNI 7. Revitalisasi pasar tradisional untuk menarik para pedagang untuk berjualan di Pasar Tradisional Banyaknya lembaga mitra kerja dan Perguruan Tinggi 8. Tersedianya TPID tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Pusat 9. Dilaksanakannya operasi pasar dalam rangka pengendalian harga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tatakelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum efektif 2. Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk 3. Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding 4. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri 5. Turunnya jumlah pengunjung pasar 6. Belum optimalnya revitalisasi fisik dan non fisik Pasar Rakyat 7. Penjaminan mutu Pasar Rakyat melalui penerapan SNI belum menyentuh banyak pasar 8. Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal 9. Masih banyaknya rentenir 10. Belum tersedia infrastruktur online untuk platform e-commerce bagi para pedagang di pasar rakyat; 11. Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal 12. Belum ada SDM khusus untuk tenaga PPNS atau PPTN 13. Fluktuasi harga bahan pokok dan penting lainnya 14. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal tertib ukur

3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Pengembangan perdagangan secara nasional menjadi tanggungjawab Kementerian Perdagangan. Sasaran jangka menengah pembangunan secara nasional dapat dilihat dari Renstra Kementerian Perdagangan periode 2020 - 2024, sebagaimana disajikan dalam tabel:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan:

No.	Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;	Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding	Banyaknya jumlah pelaku usaha yang kreatif di Kabupaten Bantul
2	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;	Fluktuasi harga bahan pokok dan penting lainnya	Dilaksanakannya operasi pasar dalam rangka pengendalian harga; Tersedianya TPID tingkat Kabupaten yang rutin melakukan koordinasi
3	Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK	Pengelolaan SRG belum optimal	Adanya kebijakan kedelai bisa masuk dalam komoditas SRG
4	Meningkatnya pasar produk dalam negeri;	Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri yang kurang	
5	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;	Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk	

Sementara itu, pengembangan sektor perdagangan di daerah juga didukung oleh Pemerintah Provinsi DIY. Pada tabel disajikan Permasalahan Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2017-2022:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan:

No.	Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Masih terbatasnya data sektor perdagangan Belum dimilikinya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Belum optimalnya sinergitas program kegiatan pembinaan sektor perdagangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Adanya forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kabupaten Bantul didasarkan pada Perda Kabupaten Bantul Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030. Pada Bab VI Pasal 65 ditetapkan kawasan strategis Kabupaten, diantaranya Kawasan strategis Ekonomi Kabupaten Bantul.

Pengembangan perdagangan perlu segera digairahkan untuk mendorong sektor-sektor lain dan mendorong laju perekonomian. Fasilitas perdagangan yang berada di pusat pertumbuhan baru kawasan Bantul diharapkan dapat menyerap tenaga kerja/mengurangi pengangguran yang terbilang masih tinggi. Revitalisasi Pasar Rakyat yang berada di kawasan strategis juga sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Isu KLHS di bidang perdagangan yang mengemuka diantaranya adalah persampahan dan limbah yang ada di pasar serta dampak lingkungan hidup terhadap pembangunan pusat perdagangan seperti toko swalayan.

Tabel. Hasil Telaah RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

RENCANA STRUKTUR RUANG/POLA RUANG	STRUKTUR/POLA RUANG SAAT INI	INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	PENGARUH RENCANA STRUKTUR RUANG TERHADAP KEBUTUHAN PELAYANAN	ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN LAYANAN PERANGKAT DAERAH	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Rencana pengelolaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa	Rencana pengelolaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa	<p>Pertumbuhan perdagangan secara linier diarahkan sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder</p> <p>Pengembangan JLSS</p> <p>Pembangunan jalan lingkaran luar Yogyakarta atau Jogja Outer Ring Road (JORR) direncanakan untuk mengurangi arus lalu lintas di jalan lingkaran (ring road)</p>	Sesuai	<p>Pengembangan usaha perdagangan</p> <p>Revitalisasi Pasar Rakyat</p>	kawasan penunjang ekonomi harus ditunjang sarana dan prasarana yang memadai sehingga menimbulkan minat investasi yang besar;	Kesesuaian RTRW

Tabel. Telaah Rekomendasi KLHS

INDIKATOR TPB	ARAHAN HASIL KLHS	REKOMENDASI PROGRAM HASIL KLHS	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
Persentase sampah yang terangkut	Pemberdayaan pedagang dan Pengelolaan Sampah	<p>Bantuan sarpras persampahan</p> <p>Pengelolaan pelayanan sampah</p>	Keterbatasan SDM dan sarpras	Kolaborasi dengan OPD pengampu persampahan (DLH)
Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang (m3)	Pengelolaan Sampah Mandiri	Pelatihan daur ulang sampah	Keterbatasan SDM dan sarpras	
Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001	Pendataan perusahaan yang menerapkan sertifikasi ISO 14001	Pendataan perusahaan yang menerapkan sertifikasi ISO 14001	Keterbatasan SDM dan sarpras	

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis Kabupaten Bantul yang berhubungan dengan ketugasan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Bantul 2021 - 2026 adalah *Peningkatan Daya Saing UKM, Peningkatan Dan Pengembangan Infrastruktur, Serta Percepatan Reformasi Birokrasi*.

Isu strategis di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul untuk periode 2021-2026 ditentukan berdasarkan Kriteria dan bobot berikut ini:

No.	Kriteria	Bobot (%)
1	Berpengaruh besar pada pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Perdagangan	15
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat	30
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	25
5	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	10

Tabel Nilai Skala Kriteria Usulan Isu Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2021 - 2026

No.	Kriteria Penilaian	Berpengaruh besar pada pencapaian sasaran pembangunan nasional	Merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Perdagangan	Dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	Total Skor
		Isu Strategis	20	15	30	25	
1	Peningkatan daya saing usaha sektor perdagangan	5	5	20	15	0	55
2	Pengelolaan Pasar Rakyat	5	5	30	20	5	65
3	Tatakelola distribusi dan harga bahan pokok/strategis serta pengawasan dan pengendalian perdagangan	10	5	25	15	0	55

Tabel Rata-rata Skor Isu Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2021 - 2026

No.	Kriteria Penilaian	Total Skor	Rata-rata Skor
1	Peningkatan daya saing usaha sektor perdagangan	55	11
2	Pengelolaan Pasar Rakyat	65	13
3	Tatakelola distribusi dan harga bahan pokok/strategis serta pengawasan dan pengendalian perdagangan	55	11

DRAFT

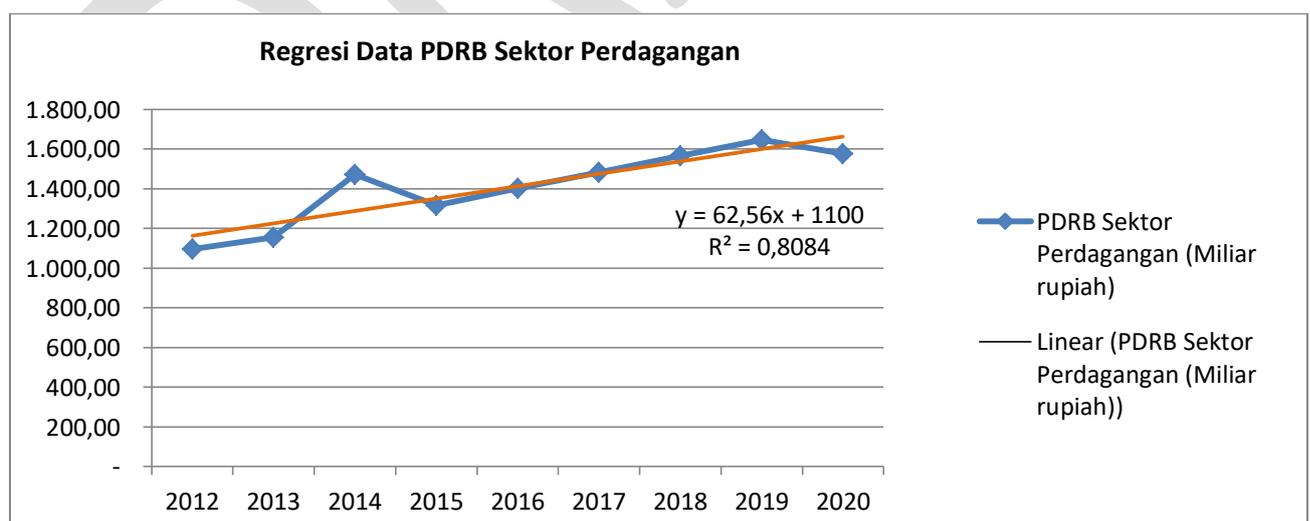
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bantul, ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, yaitu:

Tabel. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 2021-2026 Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Renstra (2021)	Target					Kondisi Akhir Renstra (2026)
				2022	2023	2024	2025	2026	
Tatakelola Sektor Perdagangan yang optimal	Kontribusi nilai sektor perdagangan terhadap PDRB yang meningkat	Indikator Tujuan: Index Kinerja Perdagangan	N/A	75	80	85	90	95	95
		Indikator Sasaran: Nilai sektor perdagangan dalam PDRB Kab. Bantul (Miliar Rupiah)	1.576,54	1.725,60	1.788,16	1.850,72	1.913,28	1.975,84	1.975,84

Target indikator tujuan dan sasaran dihitung berdasarkan analisis tren (data tahun 2012-2020) untuk periode tahun 2021-2026, dengan perhitungan sebagai berikut:



Berdasarkan rumus regresi yang didapat dari analisa tren tersebut, dapat ditentukan proyeksi nilai sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2021-2026 yaitu:

Proyeksi Nilai Sektor Perdagangan terhadap PDRB dari Hasil Analisa Tren



DRAFT

DRAFT

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Strategi dapat disusun menggunakan analisis SWOT. SWOT disusun berdasarkan sasaran yang hendak dicapai. Berikut analisis SWOT untuk menentukan strategi yang dapat ditempuh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan sasaran.

DRAFT

Matriks Analisis SWOT

ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL	ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya jumlah pelaku usaha 2. Dukungan IT 3. Jumlah pedagang pasar yang besar 4. Terdapat pasar ber-SNI 5. Tersedianya TPID tingkat Kabupaten 6. Kreativitas yang tinggi sebagai modal dasar pengembangan produk yang inovatif. 7. Daya saing produk seni dan kreatif yang tinggi dapat menembus pasar nasional dan internasional 8. PSG sebagai salah satu icon tempat belanja wisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Database Perdagangan yang belum update dan belum tervalidasi 2. Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding 3. Turunnya jumlah pengunjung pasar sehingga pendapatan pedagang menurun 4. Revitalisasi fisik dan non fisik (revitalisasi manajemen, ekonomi, dan sosial) Pasar Rakyat belum optimal 5. Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal 6. Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal 7. Belum ada SDM khusus untuk tenaga PPNS 8. Lemahnya IKM/UKM dalam mengakses bahan baku, permodalan, pengembangan produk maupun pasar, 9. Lemahnya enterpreneurship dan penguasaan teknologi pelaku IKM 10. Pedagang Kaki Lima yang belum tertata 	
PELUANG	STRATEGI (PELUANG+KEKUATAN)	STRATEGI (PELUANG+KELEMAHAN)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan Bebas yang dapat memberi peluang ke akses internasional dan kerjasama antar wilayah 2. Perkembangan pariwisata menjadi peluang dalam mengembangkan IKM 3. Dukungan IT 4. Dukungan program dari APBN, DAIS, dan CSR 5. Banyaknya lembaga mitra kerja dan Perguruan Tinggi di Yogyakarta yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan inovasi dan pendampingan pelaku usaha di Kabupaten Bantul 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan UKM melalui pengembangan aspek desain, packaging, dan pemasaran produk 2. Pengembangan entrepreneurship 3. Pemanfaatan IT untuk mendukung usaha perdagangan 4. Optimalisasi pengelolaan PSG 5. Peningkatan sarana prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun sistem informasi/database Perdagangan 2. Peningkatan fasilitas promosi bagi pelaku usaha 3. Standar fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha 4. Revitalisasi pasar rakyat menuju standarisasi SNI 5. Menggiatkan Promosi Pasar Rakyat 6. Penataan Pedagang Kaki Lima 	
ANCAMAN	STRATEGI (ANCAMAN+KEKUATAN)	STRATEGI (ANCAMAN+KELEMAHAN)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. tatakelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum efektif 2. Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk 3. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri 4. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pandemic covid-19 5. Infrastruktur yang kurang baik sehingga menghambat kinerja pelaku ekspor 6. Persaingan usaha yang kurang sehat antara pengusaha pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar 7. Fluktuasi Harga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan layanan perizinan dan non perijinan berbasis teknologi informasi 2. Peningkatan pengawasan distribusi bahan pokok/bahan strategis 3. Menyusun aturan tentang kewajiban pelaporan informasi gudang 4. Stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok 5. Optimalisasi peran Tim Inflasi Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran 2. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 3. Melakukan pendampingan dan pemantauan proses pemasaran produk UMK secara berkesinambungan 4. Peningkatan kapasitas pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL 	

Dari hasil tabel analisis SWOT tersebut maka strategi yang dapat dilakukan adalah:

1. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha,
2. Fasilitasi sarana promosi serta pengembangan aspek desain, packaging, hingga pemasaran termasuk melakukan pendampingan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan;
3. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
4. Revitalisasi pasar rakyat menuju standarisasi SNI termasuk optimalisasi pengelolaan PSG
5. Peningkatan tatakelola SRG
6. Peningkatan tatakelola pemberian rekomendasi perizinan usaha bidang perdagangan

Tabel
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika		
Misi	pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tatakelola Sektor Perdagangan yang optimal	Kontribusi nilai sektor perdagangan terhadap PDRB yang meningkat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan penggunaan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, dan pengelolaan persaingan usaha, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 2. fasilitasi sarana promosi serta pengembangan aspek desain, packaging, hingga pemasaran termasuk melakukan pendampingan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan; 3. Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan 4. Peningkatan tatakelola pemberian rekomendasi perizinan usaha bidang perdagangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pokok/Barang Strategis 2. Penguatan Pelaku Usaha termasuk pedagang pasar dan PKL sehingga dapat meningkatkan nilai tambah/daya saing produk usaha 3. Peningkatan Kapasitas Metrologi dan dan Peningkatan Pengawasan Kegiatan Perdagangan 4. Peningkatan Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan 5. Meningkatkan sistem rekomendasi perizinan usaha yang lebih efektif dan efisien

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program/kegiatan/sub kegiatan.

No	Program Pembangunan Daerah	
	Program Unggulan Bupati-Wakil Bupati Terpilih	Program Operasional Dinas Perdagangan
1	Penyerapan investasi bidang perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
2	Modernisasi Pasar Rakyat	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 2. Program Pengembangan Ekspor 3. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 4. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program, kegiatan, dan sub kegiatan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rencana program, indikator dan target kinerja program serta kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan untuk tahun 2021-2026 beserta dukungan pendanaan sebagaimana tersaji pada Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-2022 (1)		Tahun-2023 (2)		Tahun 2024 (3)		Tahun-2025 (4)		Tahun-2026 (5)		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target			Rp (juta rupiah)
Tatakelola Sektor Perdagangan yang optimal	Kontribusi nilai sektor perdagangan terhadap PDRB yang meningkat			Nilai sektor perdagangan dalam PDRB Kab.Bantul (Miliar Rupiah)	1.576,54	1.725,60		1.788,16		1.850,72		1.913,28		1.975,84		1.975,84		Disdag Kab. Bantul	Disdag Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-2022 (1)		Tahun-2023 (2)		Tahun 2024 (3)		Tahun-2025 (4)		Tahun-2026 (5)		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target			Rp (juta rupiah)
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai AKIP	83 angka	83 angka	14.715	84 angka	16.000	84 angka	17.250	85 angka	18.050	85 angka	19.050	85 angka	19.050		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	100%	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%	200		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Renstra, KAK Rencana Kegiatan, KAK Kegiatan, KAK Perubahan, Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan)	10 dokumen	9 dokumen	100	9 dokumen	100	9 dokumen	100	9 dokumen	100	10 dokumen	100	10 dokumen	100		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKj, LPPD, LKPJ, Evaluasi Kinerja Bulanan, IKM Semester 1, IKM Semester II)	17 dokumen	17 dokumen	100	17 dokumen	100	17 dokumen	100	17 dokumen	100	17 dokumen	100	17 dokumen	100		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	100%	11.000	100%	12.200	100%	13.400	100%	14.500	100%	15.500	100%	15.500		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji	17 kali	17 kali	10.000	17 kali	11.000	17 kali	12.000	17 kali	13.000	17 kali	14.000	17 kali	14.000		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi	1 dokumen	1 dokumen	1.000	1 dokumen	1.200	1 dokumen	1.400	1 dokumen	1.500	1 dokumen	1.500	1 dokumen	1.500		
				Jumlah Laporan Keuangan	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-		
				Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen	-		
				Jumlah Laporan Persediaan	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi		
						Tahun-2022 (1)		Tahun-2023 (2)		Tahun 2024 (3)		Tahun-2025 (4)		Tahun-2026 (5)				Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)			Target	Rp (juta rupiah)
				Sewa lahan untuk pasar per tahun	11 pasar/tahun	11 pasar/th		11 pasar/th		11 pasar/th		11 pasar/th		11 pasar/th		11 pasar/th	-		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%	200	100%	200		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Updating data pegawai	1 dokumen	1 dokumen	25	1 dokumen	25	1 dokumen	25	1 dokumen	25	1 dokumen	25	1 dokumen	25		
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	25	1 dokumen	25	1 dokumen	25	1 dokumen	25	1 dokumen	25	1 dokumen	25		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase keberhasilan SDM terhadap pelaksanaan pelatihan/bimtek/sosialisasi	75%	75%	150	75%	150	75%	150	75%	150	75%	150	75%	150		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100%	100%	1.525	100%	1.425	100%	1.325	100%	1.325	100%	1.325	100%	1.325		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	AC	1 unit	1 unit	600	1 unit	500	1 unit	400	1 unit	400	1 unit	400	1 unit	400		
				PC	2 unit	5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit	-		
				Printer	3 unit	5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit	-		
				mebelair	0	10 unit				10 unit				10 unit		10 unit	-		
				scanner	0	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	-		
				Hardisk external	0	5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit	-		
				laptop	0	10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit	-		
				Proyektor	0	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	-		
				TV LCD	0	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi		
						Tahun-2022 (1)		Tahun-2023 (2)		Tahun 2024 (3)		Tahun-2025 (4)		Tahun-2026 (5)				Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)			Target	Rp (juta rupiah)
				kamera	0	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit			
				Ozone Generator	0	2 unit		2 unit		2 unit						-			
				Mesin fotokopi	0	0		1 unit								-			
				Filling Cabiner	0	0		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit			
				Jam dinding	5 unit	10 unit				10 unit				10 unit		10 unit			
				CCTV	0	0		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Kegiatan	20 dokumen	20 dokumen	800	20 dokumen	800	20 dokumen	800	20 dokumen	800	20 dokumen	800	20 dokumen	800		
				Laporan Hasil Rapat	20 dokumen	20 dokumen		20 dokumen		20 dokumen		20 dokumen		20 dokumen		20 dokumen			
				Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Kecamatan & Dalam DIY)	450 op	450 op		450 op		450 op		450 op		450 op		450 op			
				Perjalanan Dinas Luar (Jawa & Luar Jawa)	9 op	9 op		20 op		30 op		30 op		30 op		30 op			
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Arsip	1 dokumen	1 dokumen	25	1 dokumen	25	1 dokumen	25	1 dokumen	25	1 dokumen	25	1 dokumen	25		
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan SPBE	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	100	12 bulan	100	12 bulan	100	12 bulan	100	12 bulan	100		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pemenuhan BMD	100%	100	550	100	550	100	550	100	250	250	250	250			
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan kendaraan roda 2	0	2 unit	550	5 unit	550	5 unit	550	5 unit	250	5 unit	250	5 unit	250		
				Penyediaan kendaraan roda 4	0	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-2022 (1)		Tahun-2023 (2)		Tahun 2024 (3)		Tahun-2025 (4)		Tahun-2026 (5)		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target			Rp (juta rupiah)
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100%	100	750	100	750	100	850	100	850		850	-	850		
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	30 jenis	30 jenis	350	30 jenis	350.	30 jenis	350	30 jenis	350	30 jenis	350	30 jenis	350		
				Bahan dan Peralatan Kebersihan	25 jenis	25 jenis		25 jenis		25 jenis		25 jenis		25 jenis		25 jenis			
				Bahan Protokol Kesehatan	2 paket	2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		2 paket			
				Barang Cetakan	10 jenis	10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis			
				Komponen Listrik	10 jenis	10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis			
				Materai	2500 lembar	2500 lembar		2500 lembar		2500 lembar		2500 lembar		2500 lembar		2500 lembar			
				Penggandaan	80.000 lembar	80.000 lembar		80.000 lembar		80.000 lembar		80.000 lembar		80.000 lembar		80.000 lembar			
				Surat Kabar	720 eksemplar	720 eksemplar		720 eksemplar		720 eksemplar		720 eksemplar		720 eksemplar		720 eksemplar			
				Telepon	12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan			
			X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak	11 orang	11 orang	400.	11 orang	400.	11 orang	500	11 orang	500	11 orang	500	11 orang	500		
				Jumlah kajian/NA/Perda/Perbup yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
			X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	100%	100%	490	100%	675	100%	725	100%	725	100%	725	100%	725		
			X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	BBM Operasional	22 liter	22 liter	400	22 liter	400	22 liter	450	22 liter	450	22 liter	450	22 liter	450		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi		
						Tahun-2022 (1)		Tahun-2023 (2)		Tahun-2024 (3)		Tahun-2025 (4)		Tahun-2026 (5)				Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)			Target	Rp (juta rupiah)
			Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

DRAFT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-2022 (1)		Tahun-2023 (2)		Tahun 2024 (3)		Tahun-2025 (4)		Tahun-2026 (5)		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target			Rp (juta rupiah)
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2	25 unit	25 unit		25 unit		25 unit		25 unit		25 unit		25 unit		-	
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 3	5 unit	5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		-	
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4	8 unit	8 unit		8 unit		8 unit		8 unit		8 unit		8 unit		-	
				Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 6	5 unit	5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		5 unit		-	
			X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpelihara	20 unit	20 unit	40	85 unit	75	85 unit	75	75							
			X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Terpelihara	1 unit	1 unit	50	1 unit	200	1 unit	200	200							
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	50%	65%	400	66%	425	67%	450	68%	475	70%	500	0,7	500		
			Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin	40	50%	200	55%	225	60%	250	65%	275	70%	300	0,7	300		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah Rekomendasi perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan	15	25 dokumen	200	30 dokumen	225	35 dokumen	250	40 dokumen	275	45 dokumen	300	45 dokumen	300		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi		
						Tahun-2022 (1)		Tahun-2023 (2)		Tahun 2024 (3)		Tahun-2025 (4)		Tahun-2026 (5)				Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)			Target	Rp (juta rupiah)
			Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																

DRAFT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi		
						Tahun-2022 (1)		Tahun-2023 (2)		Tahun 2024 (3)		Tahun-2025 (4)		Tahun-2026 (5)				Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)			Target	Rp (juta rupiah)
				Laporan Data Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-		
				Laporan Data Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-		
				Laporan Hasil Monitoring perijinan usaha	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-		
			Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1. Persentase penerbitan TDG	100%	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50		
				2. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	80%	70%		60%		50%		40%		30%		30%	-		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	TDG yang difasilitasi	0	1 dokumen	50	2 dokumen	50	2 dokumen	50	2 dokumen	50	2 dokumen	50	2 dokumen	50		
				Laporan Monitoring dan evaluasi Gudang	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-		
50 50 50 50			Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0	0	50	2%	50	3%	50	4%	50	5%	50	5%	50		
				Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0	0		1%		1%		1%		1%		1%	-		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba	Rekomendasi Pemenuhan komitmen STPW yang difasilitasi	0	0	50	5 dokumen	50	10 dokumen	50	15 dokumen	50	20 dokumen	50	20 dokumen	50		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi		
						Tahun-2022 (1)		Tahun-2023 (2)		Tahun-2024 (3)		Tahun-2025 (4)		Tahun-2026 (5)				Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)			Target	Rp (juta rupiah)
			(STPW) Dalam Negeri																
				Jumlah perusahaan waralaba yang mendapatkan sosialisasi STPW	-	20 toko	20 toko	20 toko	20 toko	20 toko	20 toko	20 toko	20 toko	20 toko	20 toko	-			
			Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	-	1%	50	2%	50	3%	50	4%	50	5%	50	5%	50		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Rekomendasi Pemenuhan komitmen STPW yang difasilitasi	-	-	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50								
50			Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi	-	-	50	1%	50	1%	50	1%	50	1%	50	1%	50		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-2022 (1)		Tahun-2023 (2)		Tahun 2024 (3)		Tahun-2025 (4)		Tahun-2026 (5)		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target			Rp (juta rupiah)
			Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan hasil pengawasan	1 dokumen	1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50	1 dokumen	50		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	1%	2%	9.250	3%	17.000	4%	18.000	5%	16.000	6%	18.000	6%	18.000		
			Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase jumlah pasar sehat	25%	30%	8.000	35%	15.000	40%	15.000	45%	15.000	50%	15.000	50%	15.000		
			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	DED pasar rakyat	1 dokumen	1 dokumen	5.000	1 dokumen	10.000	1 dokumen	10.000								
				Masterplan pasar	-	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	-		
				pemenuhan sarana kebersihan pasar	-	31 pasar		31 pasar		31 pasar		31 pasar		31 pasar		31 pasar	-		
				pemenuhan sarana keamanan pasar	-	31 pasar		31 pasar		31 pasar		31 pasar		31 pasar		31 pasar	-		
				pemenuhan sarana armada sampah	-	15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang		15 orang	-		
				pemenuhan sarana pengolahan sampah	-	-		-		-		-		-		0	-		
				Pemeliharaan pasar	1 pasar	10 pasar		10 pasar		10 pasar		10 pasar		10 pasar		10 pasar	-		
				Revitalisasi pasar	1 pasar	2 pasar		2 pasar		2 pasar		2 pasar		2 pasar		2 pasar	-		
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi	Terpeliharanya kawasan PSG	1 kawasan	1 kawasan	3.000	1 kawasan	5.000	1 kawasan	5.000								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi		
						Tahun-2022 (1)		Tahun-2023 (2)		Tahun 2024 (3)		Tahun-2025 (4)		Tahun-2026 (5)				Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)			Target	Rp (juta rupiah)
			Perdagangan																

DRAFT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi		
						Tahun-2022 (1)		Tahun-2023 (2)		Tahun 2024 (3)		Tahun-2025 (4)		Tahun-2026 (5)				Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)			Target	Rp (juta rupiah)
				Terbangunnya kawasan PKL/Perdagangan lainnya	-	1 kawasan		1 kawasan		1 kawasan		1 kawasan		1 kawasan		1 kawasan	-		
				Pemberdayaan UMKM di PSG	-	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang	-		
				Promosi PSG	-	3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali	-		
				Terbitnya Produk Hukum terkait Retribusi PKL	-	1 dokumen		1 dokumen		-		-		0		0	-		
				Pendampingan pada PKL/pelaku usaha lainnya	-	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali	-		
				Fasilitasi Sarpras bagi PKL				100 unit		100 unit		100 unit		100 unit		100 unit			
			Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Cakupan pelaku usaha yang dibina	2%	5%	1.250	10%	2.000	15%	3.000	20%	1.000	25%	3.000	25%	3.000		
			Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	80% dari peserta pelatihan pedagang meningkat pengetahuan dan kemampuannya	60 orang	160	500	160	1.000	160	2.000	160		160	2.000	160	2.000		
				Jumlah APPSI yang didampingi	10 kelompok	10 kelompok		10 kelompok		10 kelompok		10 kelompok		10 kelompok		10 kelompok	-		
				Wisata Edukasi Pasar	-	30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang		30 orang	-		
				Jumlah pedagang milenial yang dibina	-	25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang	-		
				Pasar rakyat ber SNI	1	1 pasar		1 pasar		1 pasar		1 pasar		1 pasar		1 pasar	-		
				Promosi Pasar (termasuk belanja berhadiah di pasar)	-	3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		3 kali	-		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-2022 (1)		Tahun-2023 (2)		Tahun 2024 (3)		Tahun-2025 (4)		Tahun-2026 (5)		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target			Rp (juta rupiah)
				Lomba Pasar	-	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Laporan PAD	12 dokumen	12 dokumen	750	12 dokumen	1.000	12 dokumen	1.000								
				Updating data pedagang yang memiliki izin	-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
				Persentase pedagang pasar yang meningkat pengetahuannya terkait retribusi pasar	-	400 orang		400 orang		400 orang		400 orang		400 orang		400 orang			
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Nilai inflasi	5%	5%	175	5%	225	4%	250	4%	275	3%	325	3%	325		
			Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapak antar waktu)	8%	8%	150	7%	200	6%	225	6%	250	6%	300	6%	300		
			Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Stabilitas harga bapak hasil pertanian pangan antar waktu	5%	5%	150	5%	200	4%	225	4%	250	4%	300	4%	300		
				Stabilitas harga bapak hasil hortikultura antar waktu	24%	24%		24%		23%		23%		23%		23%			
				Stabilitas harga bapak hasil peternakan antar	9%	9%		9%		8%		8%		8%		0,08			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi		
						Tahun-2022 (1)		Tahun-2023 (2)		Tahun 2024 (3)		Tahun-2025 (4)		Tahun-2026 (5)				Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)			Target	Rp (juta rupiah)
				waktu															

DRAFT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi			
						Tahun-2022 (1)		Tahun-2023 (2)		Tahun 2024 (3)		Tahun-2025 (4)		Tahun-2026 (5)				Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra		
						Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)			Target	Rp (juta rupiah)	
				Stabilitas harga bapak hasil industri antar waktu	10%	10%		10%		9%		9%		9%		0,09	-			
				Jumlah data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang akurat	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen	-			
				Laporan hasil pemantauan bahan penting lainnya di beberapa pelaku usaha	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen	-			
				Laporan jumlah Gudang/SRG yang dimanfaatkan	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-			
				Operasi pasar dalam rangka stabilitas harga bapakting menjelang HKBN	2 OPM	3 OPM	50	3 OPM	50	3 OPM	50	3 OPM	50	3 OPM	50	3 OPM	50			
				Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40%	45%	25	46%	25	47%	25	48%	25	50%	25	50%	25			
				Laporan pengawasan pupuk	1 dokumen	1 dokumen	25.	1 dokumen	25	1 dokumen	25	1 dokumen	25	1 dokumen	25	1 dokumen	25			
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	60 juta US\$	80 juta US\$	800	90 juta US\$	4.800	100 juta US\$	4.800	110 juta US\$	-	120 juta US\$	4.800	120 juta US\$	4.800		
				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi	Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran	-	50%	00	50%	4.800	50%	4.800	50%	-	50%	4.800	50%	4.800		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi		
						Tahun-2022 (1)		Tahun-2023 (2)		Tahun 2024 (3)		Tahun-2025 (4)		Tahun-2026 (5)				Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)			Target	Rp (juta rupiah)
			Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																

DRAFT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-2022 (1)		Tahun-2023 (2)		Tahun 2024 (3)		Tahun-2025 (4)		Tahun-2026 (5)		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target			Rp (juta rupiah)
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	80% Dari 60 Orang Peserta Pelatihan Meningkatkan Pengetahuan Dan Kemampuannya	30 orang	40 orang	800	40 orang	800	40 orang	800	40 orang	800	40 orang	800	40 orang	800		
				Laporan Data Ekspor	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen	-		
				Temu Bisnis	-	1 event		1 event		1 event		1 event		1 event		1 event	-		
				Fasilitasi Penjualan Online			1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun				
			Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	jumlah pameran	-			5 event	2.000	5 event	2.000								
			Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	jumlah pameran	1 event	2 event		3 event	1.000	3 event	1.000								
			Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah misi dagang ke negara mitra	-	-		1 promosi	500	1 promosi	500								
			Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	jumlah pencitraan yang dilaksanakan	-	-		1 kegiatan	500	1 kegiatan	500								
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	25%	30%	350	35%	3.600	40%	650	45%	700	45%	750	45%	750		
			Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan;	25%	30%	350	35%	3.600	40%	650	45%	700	45%	750	45%	750		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal,	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang pada tahun n	7500 unit	8000 unit	300	8500 unit	3.500	9000 unit	500	9500 unit	500	9500 unit	500	9500 unit	500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi		
						Tahun-2022 (1)		Tahun-2023 (2)		Tahun 2024 (3)		Tahun-2025 (4)		Tahun-2026 (5)				Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)			Target	Rp (juta rupiah)
			Berupa Tera, Tera Ulang																

DRAFT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja	Lokasi	
						Tahun-2022 (1)		Tahun-2023 (2)		Tahun 2024 (3)		Tahun-2025 (4)		Tahun-2026 (5)		Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target			Rp (juta rupiah)
				pembangunan gedung metrologi tahap 2	-			1 unit		-		-		-		-			
				pemeliharaan gedung metrologi	-			1 unit											
				layanan perkantoran	12	12		12		12		12		12		12			
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Peningkatan pemahaman konsumen/pelaku usaha tentang kemetrologian	-	50%	50	50%	100	50%	150	50%	200	50%	250	0,5	250		
				Jumlah BDKT yang diawasi	-	10 unit		20 unit		30 unit		40 unit		50 unit		50 unit			
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan toko swalayan	-	-	-	55%	800	60%	800	65%	800	70%	800	70%	800		
			Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Peningkatan potensi transaksi pelaksanaan promosi produk	-	-	-	5%	800.	10%	800	10%	800	10%	800	10%	800		
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi promosi dan pemasaran produk dalam negeri dan produk unggulan daerah	-	-		1 event	500	1 event	500	2 event	500	2 event	500	2 event	500		
			Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	kampanye penggunaan produk lokal	-	-		1 event	200	1 event	200								
			Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan	Temu usaha perdagangan	-	-		1 kali	100	1 kali	100								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi		
						Tahun-2022 (1)		Tahun-2023 (2)		Tahun 2024 (3)		Tahun-2025 (4)		Tahun-2026 (5)				Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)			Target	Rp (juta rupiah)
			Informasi Perdagangan																

DRAFT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi		
						Tahun-2022 (1)		Tahun-2023 (2)		Tahun 2024 (3)		Tahun-2025 (4)		Tahun-2026 (5)				Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)			Target	Rp (juta rupiah)
			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN																
			Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Persentase Jumlah Pasar Rakyat Bercagar Budaya yang direvitalisasi	-	8%		9%	200	10%	2.200	11%	2.200	12%	2.200	12%			
			Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya****)	Revitalisasi Pasar Rakyat yang Bercagar Budaya		1 pasar	400	2 pasar	2.000	2 pasar	2.000	3 pasar	2.000	3 pasar	000	3 pasar	2.000		
				DED Reviu Pasar Bercagar Budaya		1 dokumen	100	2 dokumen	200	2 dokumen	200	2 dokumen	200	5 dokumen	200	5 dokumen	200		
			Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya****)	Peningkatan Pengetahuan IKM	-	75%	200	75%		75%		75%		75%		75%			
			Sub Kegiatan Pengembangan Industri Kreatif****)	Fasilitasi Sarpras pemasaran bagi IKM		-		50 IKM	200	50 IKM									
				Fasilitasi Perizinan Berusaha		-		25 IKM	25	25 IKM									
				Peningkatan Nilai Produk melalui Pelatihan desain produk dan packaging		-		30 IKM	50	30 IKM									
				Peningkatan SDM UKM melalui pelatihan penguasaan Bahasa Inggris dan Komputer		-		30 IKM	50	30 IKM									
				Pelatihan Pelayanan Customer Service dan Membership untuk Konsumen		-		30 IKM	50	30 IKM									
				Fasilitasi promosi Komunitas Antikan		-		2 kali	200	2 kali	200	2 kali	0	2 kali	200	2 kali			
				Fasilitasi pemasaran bagi IKM produk jamu		50 unit	200	50 unit	200	50 unit	200	50 unit	200	50 unit	200	50 unit			
			Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga																

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja	Lokasi		
						Tahun-2022 (1)		Tahun-2023 (2)		Tahun 2024 (3)		Tahun-2025 (4)		Tahun-2026 (5)				Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra	
						Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)	Target	Rp (juta rupiah)			Target	Rp (juta rupiah)
			Budaya****)																
			Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat****)	Terselenggaranya Sekolah Pasar		100 peserta	100.	100 peserta	100	100 peserta									

DRAFT

DRAFT

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perdagangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul ini ditampilkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 7-1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Periode RPJMD(2026)	Ket.
			2022	2023	2024	2025	2026		
1	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB Kab. Bantul (Miliar Rupiah)	1.576,54	1.725,60	1.788,16	1.850,72	1.913,28	1.975,84	1.975,84	

BAB VIII

PENUTUP

Pengembangan usaha sektor perdagangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah akan tetapi juga tanggungjawab pemangku kepentingan lainnya diantaranya lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama. Oleh karena itu sinergitas antara kedua pemangku kepentingan menjadi hal yang penting. Dengan adanya Renstra ini diharapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sektor perdagangan dapat menjadi lebih tepat sasaran, serta lebih optimal manfaatnya bagi masyarakat

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Renstra ini menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang tertulis pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Rencana jangka menengah dalam Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan lagi kedalam perencanaan jangka pendek atau tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk tahun 2022 hingga tahun 2026 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bantul dan mempertimbangkan perkembangan yang terjadi disetiap tahun. Dengan demikian penjabaran Renstra kedalam Renja SKPD atau dokumen-dokumen perencanaan lain dapat bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan RKPD Pemerintah Kabupaten Bantul yang ditetapkan.

Bantul,

2021

BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH